

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN CIAMIS



# RENCANA KERJA (RENJA)



Tahun  
**2021**

Jalan Jenderal Sudirman No. 220, Sindangrasa, Kecamatan Ciamis  
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215  
No Telp. (0265) 773000

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami dapat menyusun rencana kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2021 sebagai pedoman dan acuan bagi semua unsur dinas dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, sebagai upaya tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan yang telah di realisasikan sampai dengan tahun 2020.

Dalam penetapan program dan jenis kegiatan yang hendak dilaksanakan mengacu kepada renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024, serta merupakan penjabaran dari renstra Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, belum sepenuhnya sempurna walaupun belum sepenuhnya sempurna walaupun demikian semoga dapat menjadi acuan capaian kinerja bagi Aparatur Instansi Pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam menunjang program pembangunan daerah pada era otonomi daerah.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021, semoga dapat dijadikan tolak ukur kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2021.

Ciamis, 2021  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. DONDON RUDIANA, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196402181987031007

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN SEBELUMNYA</b>	
2.1 EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA .....	5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS .....	7
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	14
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS .....	15
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN .....	36
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 .....	41
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
<b>Tabel 2.1</b> Tabel Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2020 .....	5
<b>Tabel 2.2</b> Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kominfo .....	8
<b>Tabel 2.3</b> Daftar KIM aktif di Lingkungan Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2020 .....	10
<b>Tabel 2.4</b> Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik .....	11
<b>Tabel 2.5</b> Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik .....	12
<b>Tabel 2.6</b> Tabel Sasaran Renstra, IKU pada Renstra Tahun 2020 - 2024 .....	12
<b>Tabel 2.7</b> Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika .....	16

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Hasil Monev Penerapan UU KIP Badan Publik di Jawa Barat .....	9

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pelayanan publik yang berkualitas, adalah sebagai salah satu ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu perlu adanya keberpihakan pelayanan publik kepada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik pada hakikatnya dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu bentuk pelayanan publik adalah penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Ciamis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Sebagai salah satu perangkat daerah, maka dalam penyusunan program kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengacu pada rencana pembangunan pemerintah daerah baik jangka pendek maupun menengah, sehingga terwujud sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara 1950);
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permen Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
25. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 555/Kpts.180-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun 2021 selanjutnya disebut Renja Diskominfo Tahun 2021 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang menggambarkan rencana tahunan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis khususnya pada Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Dokumen Rencana Kerja Diskominfo untuk tahun 2021 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- b. Untuk menentukan capaian program/ kegiatan tahunan, kegiatan prioritas Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Ciamis.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

### **BAB II**

#### **PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021**

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021 dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**TAHUN SEBELUMNYA**

**2.1 EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD. Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun tahun sebelumnya berikut adalah hasil evaluasi renja pada tahun 2020 :

**Tabel 2.1** Tabel Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2020

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Keterangan
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	
2.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100	
3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	
7.	Penyediaan Makan dan Minuman	100	
8.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100	
9.	Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah	100	

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Keterangan
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	
10.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	
11.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100	
12.	Pengadaan Peralatan Kantor	100	
13.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	100	
14.	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	100	
15.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	100	
16.	Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor	100	
17.	Penyusunan perencanaan DED gedung kantor	100	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100</b>	
18.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	
19.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100	
20.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100	
21.	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD	100	
<b>IV</b>	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	
22.	Penyusunan Rencana Kerja	100	
23.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	100	
24.	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	100	
<b>V</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b>	<b>100</b>	
25.	Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio	100	
<b>VI</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>100</b>	
26.	Pembinaan dan Pendataan Kelompok Informasi	100	

No.	Program/ Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Keterangan
	Masyarakat (KIM)		
27.	Pengelolaan Informasi Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	100	
28.	Penyebarluasan Informasi Melalui Media		
<b>VII</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>100</b>	
29.	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	100	
<b>VIII</b>	<b>Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>100</b>	
30.	Pendataan Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis	100	
<b>IX</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>100</b>	
31.	Pengelolaan Data Statistik Sektoral	100	
32.	Diseminasi data statistik sektoral	100	
<b>X</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIPD)</b>	<b>100</b>	
33.	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	100	

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS

Diskominfo merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Ciamis yang menyelenggarakan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat. Adapun bentuk pelayanan dan sarana pendukung yang sudah cukup dikenal di kalangan aparatur dan masyarakat adalah sebagai berikut :

### 1. Urusan Kominfo

Urusan Kominfo terdiri dari Sekretariat, Bidang Komunikasi Diseminasi dan Informasi, Seksi Telematika. Adapun capaian kinerja pelayanan dinas tercantum pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2** Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kominfo

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
1	Penyebaran informasi dengan melibatkan masyarakat dan Penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat melalui media elektronik	1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2) Persentase permohonan informasi yang dilayani 3) Persentase KIM aktif	Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1) 70 2) 100% 3) 100%	1) 50.47 2) 100% 3) 100%	1) 72.10% 2) 100% 3) 100%
2	Meningkatnya Penerapan e - Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis	1) Persentase Pemanfaatan Hosting 2) Persentase OPD Yang Memiliki e - Government 3) Persentase OPD yang memiliki layanan SPBE	Bidang Telematika dan Persandian, Seksi Telematika	1) 50% 2) 30% 3) 30% 4) Level I	1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) Level I	1) 200.00 % 2) 333.33 % 3) 333.33 % 4) 100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1) Nilai LHE AKIP 2) Level Maturitas SPIP 3) Kualitas Laporan Keuangan	Sekretariat	1) B 2) 3 3) 100	1) B 2) 3 3) 100	1) 100% 2) 100% 3) 100%
4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	1) IKM Diskominfo	Sekretariat	1) 83.36	1) 83.36	1) 100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika persentasenya mencapai 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Sasaran penyebaran informasi dengan melibatkan masyarakat dan Penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat melalui media elektronik dengan indikator :

1) Indeks Keterbukaan Informasi, hasil penilaian dari Indeks KIP Kabupaten Ciamis adalah 50,47 % perhitungan tersebut berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2020 yang dihadiri oleh juri MONEV 2020 dan para komisioner Komisi Informadi Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Ciamis termasuk dalam kategori informatif hal tersebut ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Hasil Monev Penerapan UU KIP Badan Publik di Jawa Barat

HASIL AKHIR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA JAWA BARAT

No	Badan Publik	Berkala	LLIP	PPID	SLIP	Setiap Saat	Serta Merta	Nilai
		15%	5%	5%	20%	25%	30%	
1	Kab. Bandung	92,63%	88,89%	100,00%	78,75%	83,75%	80,00%	84,03%
2	Kota Bekasi	76,84%	95,56%	100,00%	87,50%	61,25%	77,33%	77,32%
3	Kota Bandung	88,42%	60,00%	100,00%	72,50%	72,00%	68,00%	74,16%
4	Kota Bogor	67,37%	71,11%	93,33%	66,25%	50,00%	65,33%	63,68%
5	Kab. Bogor	61,05%	82,22%	100,00%	87,50%	30,00%	54,67%	59,67%
6	Kab. Majalengka	56,84%	82,22%	100,00%	83,75%	25,00%	57,33%	57,84%
7	Kab. Karawang	51,58%	86,67%	86,67%	62,50%	45,00%	57,33%	57,35%
8	Kota Tasikmalaya	74,74%	73,33%	93,33%	60,00%	20,00%	62,67%	55,34%
9	Kota Cimahi	67,37%	82,22%	90,00%	53,75%	20,00%	69,33%	55,27%
10	Kota Depok	67,37%	75,56%	73,33%	70,00%	23,75%	50,67%	52,69%
11	Kab. Ciamis	47,37%	20,00%	93,33%	57,50%	20,00%	70,67%	50,47%
12	Kota Cirebon	52,63%	62,22%	73,33%	52,50%	26,25%	58,67%	49,34%
13	Kab. Sukabumi	36,84%	20,00%	73,33%	27,50%	20,00%	61,33%	39,09%
14	Kab. Indramayu	47,37%	20,00%	56,67%	42,50%	20,00%	48,00%	38,84%
15	Kab. Subang	44,21%	80,00%	80,00%	36,25%	20,00%	37,33%	38,08%
16	Kab. Purwakarta	43,16%	20,00%	60,00%	32,50%	20,00%	45,33%	35,57%
17	Kab. Tasikmalaya	47,37%	37,78%	46,67%	22,50%	20,00%	48,00%	35,23%
18	Kab. Pangandaran	47,37%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	50,67%	33,31%
19	Kab. Sumedang	40,00%	73,33%	80,00%	40,00%	20,00%	20,00%	32,67%
20	Kab. Bekasi	31,58%	73,33%	20,00%	20,00%	20,00%	45,33%	32,00%
21	Kab. Cirebon	43,16%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	48,00%	31,87%
22	Kab. Cianjur	40,00%	20,00%	30,00%	36,25%	20,00%	20,00%	26,75%
23	Kab. Bandung Barat	40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	49,33%	22,80%
24	Kota Banjar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kota Sukabumi	68,42%	20,00%	66,67%	47,50%	20,00%	58,67%	46,70%

Data Terbesar	84,03%	0%-21.9%	Tidak Informatif
Data Terkecil	0,00%	22%-36.9%	Kurang Informatif
Median	44,21%	37%-52,9%	Cukup Informatif
Banyak kelas	5	53%-67.9%	Menuju Informatif
		68%-84%	Informatif

Sumber: BAP Hasil Monev Penerapan UU KIP Badan Publik di Jawa Barat

2) Persentase permohonan yang dilayani, persentase dari indikator tersebut yaitu 100% dengan pengukuran perhitungan berdasarkan jumlah permohonan informasi

dari masyarakat yang masuk melalui alamat <https://www.lapor.go.id/> dengan jumlah laporan sebanyak 123 laporan dengan status laporan terlayani sebanyak 123 laporan sehingga persentasenya menjadi 100%.

- 3) Persentase KIM aktif, persentase KIM aktif adalah 100% dengan jumlah KIM di Kabupaten Ciamis sebanyak 14 KIM dengan status aktif, rincian persebaran KIM sebagai berikut :

**Tabel 2.3** Daftar KIM aktif di Lingkungan Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2020

No.	Kelompok Informasi Masyarakat	Status KIM	Ket
1	KIM Desa Sidamulih	Aktif	
2	KIM Desa Bangunsari	Aktif	
3	KIM Desa Sukahurip	Aktif	
4	KIM Desa Bangunharja	Aktif	
5	KIM Bermanfaat Desa Mulyasari	Aktif	
6	KIM Bewara Desa Bayasari	Aktif	
7	KIM Indrajaya Desa Jatinagara	Aktif	
8	KIM Sukamitra Desa Sukanagara	Aktif	
9	KIM Cintalaksana Desa Cinta Nagara	Aktif	
10	KIM Baktilaksana Desa Dayeuhluhur	Aktif	
11	KIM Kelurahan Linggarsari	Aktif	
12	KIM Meralaya Desa Mekarsari	Aktif	
13	KIM Ciomas Panjalu Desa Ciomas	Aktif	Terbentuk 2020
14	KIM Kidang Kencana Desa Cieurih	Aktif	Terbentuk 2020

2. Meningkatnya Penerapan e-Government di Lingkungan Pemkab Ciamis dengan indikator :

- 1) Cakupan layanan internet pada perangkat daerah yang terintegrasi melalui fiber optic, realisasi capaian indikator yaitu 200 % dengan perhitungan target sebelumnya 50 % sedangkan capaiannya 100 % , hal tersebut karena seluruh OPD sudah terintegrasi melalui fiber optic. Jumlah OPD sebanyak 55 terdapat pada lampiran.
- 2) Persentase pemanfaatan hosting untuk sistem informasi manajemen pemerintahan, realisasi capaian indikator yaitu 333.33 % dengan perhitungan target sebelumnya

30 % sedangkan capaiannya 100 % , hal tersebut karena seluruh OPD sudah memanfaatkan hosting untuk sistem informasi manajemen pemerintahan. Jumlah OPD sebanyak 55 terdapat pada lampiran.

- 3) Persentase OPD yang memiliki layanan SPBE realisasi capaian indikator yaitu 333.33 % dengan perhitungan target sebelumnya 30 % sedangkan capaiannya 100 % , hal tersebut karena seluruh OPD sudah memiliki layanan SPBE. Jumlah OPD sebanyak 55 terdapat pada lampiran.

Capaian kinerja untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tercermin dalam Indeks SPBE yang dicapai oleh Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020, yaitu 2,64 (Baik), yang sebelumnya pada tahun 2019 memperoleh 2,35 (cukup).

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :
  - 1) Nilai LHE AKIP (100%)
  - 2) Level Maturitas SPIP (100%)
  - 3) Kualitas Laporan Keuangan (100%)
  - 4) Terlaksananya bimbingan teknis (0 bulan), kegiatan bimtek pada DPA tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan.
4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dengan indikator :  
IKM Diskominfo (83.36) nilai capaian diperoleh dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

## 2. Urusan Statistik

Urusan Statistik terdiri dari Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Data Elektronik. Adapun capaian kinerja pelayanan dinas tercantum pada tabel 2.3.

**Tabel 2.4** Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	PERSENT ASE
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral	1) Persentase reelease data statistik	Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Data Elektronik	1) 100%	1) 100%	1) 100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral dengan indikator persentase realease data statistik, indikator rilis data statistik yaitu 100% dengan perhitungan rilis yang dilaksanakan oleh urusan statistik. Bukti rilis data statistik terdapat pada lampiran.

### 3. Urusan Persandian

Urusan Persandian terdiri dari Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Data Elektronik. Adapun capaian kinerja pelayanan dinas tercantum pada tabel 2.4.

**Tabel 2.5** Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	PERSENT ASE
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya Penerapan e - Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis	1) Indeks Keamanan Informasi (KAMI )	Bidang Telematika dan Persandian, Seksi Persandian	1) Level I	1) Level I (self assesment)	1) 100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa indeks keamanan informasi (KAMI) termasuk kedalam Level I sesuai dengan target sebelumnya sehingga persentasenya menjadi 100%. Perhitungan pada Indeks KAMI terdapat pada lampiran.

Adapun acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tabel 2.6 :

**Tabel 2.6** Tabel Sasaran Renstra, IKU pada Renstra Tahun 2020 - 2024

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal Target 2019	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Kab. Ciamis								
		Penyebaran informasi dengan melibatkan masyarakat dan Penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat melalui media elektronik	(1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	N/A	70	73	75	77	80
			(2) Persentase permohonan informasi yang dilayani	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
			(3) Persentase KIM aktif	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penerapan e-Government di Lingkungan Pemkab Ciamis	(1) Cakupan layanan internet pada perangkat daerah yang terintegrasi melalui fiber optic	0	50%	60%	70%	80%	90%
			(2) Persentase pemanfaatan hosting untuk sistem informasi manajemen pemerintahan	0	30%	40%	50%	60%	70%
			(3) Persentase OPD yang memiliki layanan SPBE	0	30%	40%	50%	60%	70%
			(4) Indeks keamanan informasi (KAMI)	Level I	Level I	Level I+ sd. II	Level II sd. II+	Level II+ sd. III	Level III+
		Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral	(1) Persentase rease data statistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Efektivitas Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfo						

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal Target 2019	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	(1) Nilai LHE AKIP	B	B	B	BB	BB	A
			(2) Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	4
			(3) Kualitas Laporan Keuangan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	(1) IKM Diskominfo	83.36	83.36	84.00	84.50	85.00	85.50

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **a. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Keberadaan sarana komunikasi dan informatika yang memadai disetiap perangkat daerah sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara *up to date* terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana koordinasi internal dan eksternal perangkat daerah di Kabupaten Ciamis. Adapun permasalahan dibidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana dan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
- c. Belum optimalnya penerapan e-government;
- d. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan prosedur pelaksanaan bidang komunikasi dan informatika.

### **b. Urusan Statistik**

Kegiatan Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. Adapun permasalahan pada urusan statistik adalah sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan data dan analisis statistik daerah;
- b. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai.

### **c. Urusan Persandian**

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini terjadi karena sebelum terbentuknya Diskominfo, urusan persandian dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Adapun permasalahan pada urusan persandian adalah sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana persandian belum memadai;
- a. Belum adanya petunjuk teknis/peraturan tingkat daerah mengenai penyelenggaraan persandian;
- b. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai;
- c. Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan urusan persandian.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.7

**Tabel 2.7** Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		12 Bulan	23.025.395.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		12 Bulan	3.819.302.766	
01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Bulan	23.191.900	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Bulan	26.834.000	
01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah rencana strategis tahun 2019-2024 yang disusun	2 Dokumen	17.817.900	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah rencana strategis tahun 2019-2024 yang disusun	2 Dokumen	17.817.900	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan yang di Evaluasi	1 Dokumen	5.374.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan yang di Evaluasi	1 Dokumen	5.549.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.030.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.030.000	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.030.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.030.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah program dan kegiatan yang dievaluasi	16 Dokumen	6.350.000	
<b>01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>25,000,000</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>3.024.556.000</b>	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.015.721.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah	3 Dokumen	6.186.500					
01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	5.781.500	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	4.555.000	
01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4.847.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4.280.000	
01.2.03	Administrasi Umum		12 Bulan	22.957.888.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	310.953.716	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, airdan listrik	12 Bulan	200.130.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	13.476.275	
01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyedia jasa kebersihan kantor	12 Bulan	234.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	157.969.371	
01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu alat tulis yang disediakan	12 Bulan	50.817.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan logistik kantor	12 Bulan	31.724.000	
01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	21.620.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	8.153.070	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	34.094.100	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	11.900.000	
01.2.03.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 unit	171.616.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	87.731.000	
01.2.03.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu bacaan perundang-undangan dan iklan media massa yang disediakan	12 Bulan	15.620.500					
01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu makanan dan minuman harian rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	123.750.000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.03.18	Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi keluar daerah	12 Bulan	287.515.000					
01.2.03.20	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	6 unit	787.950.000					
01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan	5 unit	90.090.000					
01.2.03.24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan	10 unit	251.583.600					

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah luas gedung kantor yang dipelihara	375 m2	20.427.130.000					
01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin	10 unit	211.695.000					
01.2.03.34	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala	12 Bulan	50.275.000					
01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12 Bulan	27.500.000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis	25 Orang	27.500.000					
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>32.522.050</b>	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan	5 Unit	16.114.450	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan	10 Unit	16.407.600	
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>272.172.000</b>	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air dan listrik	12 Bulan	125.172.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	147.000.000	
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>152.265.000</b>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala	10 Unit	116.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala	10 Unit	36.265.000	
02	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>6.494.630.200</b>	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>247.867.554</b>	
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kelengkapan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	6.494.630.200					
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten media yang dikelola	100 %	4.249.051.900	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten media yang dikelola	100 %	160.750.554	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	3 Paket	1.296.532.300					
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang dilayani	100 %	777.084.000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang dilayani	100 %	87.117.000	
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah media dan komunitas yang bermitra	100 %	171.962.000					
03	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>7.779.339.800</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>4.509.244.080</b>	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota			4.080.000.000	
03.02.01	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota		12 Bulan	3.807.315.000					
03.2.01.02	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah domain dan subdomain (non go.id)	1 Paket	62.415.000					
03.2.01.03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi akses internet	53 perangkat	3.744.900.000	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi akses internet	53 perangkat	4.080.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03.2.02	Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			3.972.024.800					
03.2.02.03	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Jumlah sarana dan infrastruktur dan data center, disaster recovery center TIK	1 paket	1.248.300.000					
03.2.02.04	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah waktu layanan publik yang terintegrasi	12 Bulan	1.107.183.800					
03.2.02.09	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Persentase penyelenggaraan TIK/ Smart City	20%	1.248.225.000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03.2.02.10	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah peserta terdidik dan terlatih yang mengikuti diklat TIK	12 bulan	368.316.000					
					<b>Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>429.244.080</b>	
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase penyelenggaraan Smart City	20%	429.244.080	
02	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>			<b>4.267.750.500</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>			<b>4.267.750.500</b>	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota			210.327.200	
02.2.02	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota			4.267.750.500					
02.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral	Data statistic sektoral yang ditetapkan	12 Bulan	1.979.139.500	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral	Data statistic sektoral yang ditetapkan	12 Bulan	139.060.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01.03	Membangun metadata statistic sektoral	Jumlah metadata statistic sektoral	12 bulan	777.871.000	Membangun metadata statistic sektoral	Jumlah metadata statistic sektoral	12 bulan	777.871.000	
02.2.01.05	Pengembangan infrastruktur	Jumlah infrastruktur yang tersedia	12 bulan	1.510.740.000					
<b>02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>			<b>1.389.684.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>			<b>215.959.400</b>	
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Penanganan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			1.116.684.000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola keamanan informasi	1 dokumen	76.362.000					
02.2.01.02	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah kebutuhan sumber daya keamanan informasi	1 paket	377.685.000					
02.2.01.03	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan hasil audit keamanan informasi yang harus diterbitkan	12 Bulan	377.685.000					
02.2.01.04	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya layanan dan kapasitas keamanan informasi	Level 1 Indeks KAMI	284.952.000	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya layanan dan kapasitas keamanan informasi	Level 1 Indeks KAMI	215.959.400	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota			273.000.000					
02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan jarring komunikasi sandi	100 %	273.000.000					



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN**

#### **3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional**

Rumusan arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Mewujudkan Pemerintah sebagai Government Publik Relation (GPR) dengan strategi :
  - a. Pemerintah sebagai penentu agenda (*agenda setting*) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya;
  - b. Membentuk lembaga jejaring komunikasi;
  - c. Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia.
2. Kebijakan Mendukung Revolusi Mental dengan strategi :
  - a. Menyusun strategi komunikasi dalam rangka efektivitas diseminasi informasi tentang revolusi mental;
  - b. Diseminasi informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait revolusi mental;
  - c. Edukasi dan advokasi kepada K/L/D, ormas, dan media mengenai revolusi mental.

Dalam pelaksanaan, Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dilaksanakan dengan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2017 dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

Keselarasan prioritas pembangunan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2020 berdasarkan RKP Tahun 2020, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun yang menjadi Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih efektif dan efisien.

### 3.1.2 Telaah Kebijakan Provinsi

#### **VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 2018-2023**

**"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi"** (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif).

Yang dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan dan sembilan program unggulan, yaitu:

1. **Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa;** melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;
2. **Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;** dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;
3. **Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;** dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;
4. **Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;** dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara,

ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

- 5. Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;** dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:

**Pertama**, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;

**Kedua**, desentralisasi pelayanan kesehatan;

**Ketiga**, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;

**Keempat**, mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata;

**Kelima**, mewujudkan pesantren juara;

**Keenam**, meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah;

**Ketujuh**, gerakan membangun desa;

**Kedelapan**, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta

**Kesembilan**, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. (Sumber : <https://jabarprov.go.id>)

Visi Misi tersebut salah satunya didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Dengan adanya layanan *online*, termasuk dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan masyarakat berbudaya informasi. Hal tersebut sebagai suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Jawa Barat.

Dengan terwujudnya Visi Misi tersebut diharapkan diperoleh manfaat antara lain:

**Bagi Pemerintah Daerah :**

- Memudahkan komunikasi antar unit kerja;
- Memudahkan pengiriman dan pengelolaan data;
- Mewujudkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.

**Bagi Masyarakat :**

- Kemudahan akses internet untuk berbagai aktivitas;
- Mendapatkan layanan yang lebih mudah;
- Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan:

- Perubahan besar (transformasi) dalam kehidupan masyarakat terjadi sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Percepatan proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi (*Information Society*) dengan merubah diri secara gradual *resource based society* menjadi *Knowledge based society*.

Masyarakat informasi ditandai dengan:

- Karya-karya bidang informasi;
- Volume arus informasi yang sangat besar ;
- Interaktivitas relasi-relasi ;
- Integrasi dan konvegrasi aktivitas-aktivitas;
- Pertumbuhan dan interkoneksi jaringan-jaringan;
- Kecenderungan mengglobal;
- Budaya post modern;
- Dan perubahan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

### **3.1.3 Telaahan Kebijakan Kabupaten**

**Visi Kabupaten Ciamis :**

***”MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA”***

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Bahwa dalam 5 tahun kedepan perekonomian daerah Kabupaten Ciamis harus kokoh kuat dalam menghadapi situasi perekonomian nasional yang seringkali tidak menentu dan perekonomian global yang berdampak terhadap perekonomian daerah. Salah satu solusi untuk meredam dampak tersebut adalah perlunya membangun kemandirian, dalam arti perekonomian harus dibangun atas dasar kekuatan potensi sumberdaya yang kita miliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan, maupun sumberdaya manusia. Selain itu perekonomian dibangun dengan memperkuat ekonomi rakyat sebagai soko guru perekonomian nasional yang selama ini telah terbukti dapat memberikan penghidupan dan pekerjaan kepada rakyat. Bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memberikan dampak pertumbuhan yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan, tetapi kesejahteraan harus dinikmati oleh semua orang (merata dan berkeadilan)

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu **MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA**, merupakan Visi yang sesuai dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Selaras dengan visi Kabupaten Ciamis tersebut, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Ciamis di Kabupaten Ciamis juga mempunyai visi yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu "Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi di Kabupaten Ciamis".

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Kabupaten Ciamis untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

#### **Misi Kabupaten Ciamis:**

Sesuai dengan visi "**MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA**", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2019 –2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung pengembangan wilayah

Misi 3 : Mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, potensi unggulan lokal dan pemberdayaan masyarakat

Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

**Misi 5 : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien**

Misi 6 : Memperkuat otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk kedalam misi 5 yaitu Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga ikut serta dalam pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis.

Dalam rangka mendukung capaian misi tersebut, penerapan SPBE di Kabupaten Ciamis mempunyai misi:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sejalan dengan kondisi di tingkat Nasional dan kondisi Jawa Barat, serta berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan Data Center sebagai pusat data Pemerintah kabupaten Ciamis;
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tupoksi serta penyelenggaraan pelayanan public;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai teknologi informasi, statistik dan persandian;
4. Peningkatan implementasi e-government Pemerintah Kabupaten Ciamis;
5. Penyediaan regulasi/kebijakan daerah yang mendukung tata kelola persandian, statistik dan komunikasi informasi publik;
6. Optimalisasi penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan;

7. Optimalisasi penyediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat;
8. Optimalisasi penyelenggaraan persandian serta pengamanan data/informasi pemerintah daerah.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana bidang komunikasi dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang komunikasi dan informatika, melaksanakan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Barat.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mengacu pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016. Adapun tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### **3.2.1 Tujuan**

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan urusan kominfo, persandian dan statistik;
2. Mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan pendayagunaan urusan kominfo, persandian dan statistik;
3. Optimalnya penggunaan alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi di Jawa Barat;
4. Membangun pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, komunikasi dan penyebarluasan informasi yang efektif untuk mendukung terwujudnya tatakelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis menerapkan SPBE yang bertujuan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan Pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu.

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran penerapan SPBE di Kabupaten Ciamis adalah :

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi pada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi;
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021**

Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuannya akan tersusun dalam melakukan perencanaan program. Kemudian program juga merupakan himpunan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Kominfo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan sebagai penyelenggara dibidang komunikasi dan informatika dituntut untuk menghasilkan program-program yang berkualitas untuk menunjang keberhasilan pembangunan teknologi informasi Kabupaten Ciamis.

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis pada dasarnya kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis harus mampu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai penggerak/pelaksana E-Government, diseminasi informasi dan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi pembangunan daerah di kabupaten Ciamis ( prioritas) juga skala Provinsi ataupun skala Nasional.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2019 - 2024 yaitu “Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua” maka program dan kegiatan yang dirancang Diskominfo Kabupaten Ciamis pada tahun 2021 terdiri dari :

### **1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- 2) Pelayanan informasi publik;

### **2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah.
- b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas;

### **3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral;
- 2) Membangun metadata statistic sektoral;

#### **4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

##### **Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupten/ Kota.**

Penerapan SPBE di Kabupaten Ciamis, sudah barang tentu memerlukan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang secara berkesinambungan dilaksanakan Audit yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Adapun audit teknologi informasi dan komunikasi ini terdiri atas:

- a. Audit infrastruktur SPBE, yaitu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- b. Audit Aplikasi SPBE, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- c. Audit Keamanan SPBE, adalah proses yang sistematis untuk pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE

Dengan adanya Sub Kegiatan Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupten/Kota, Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penerapan SPBE diharapkan akan melaksanakan audit teknologi teknologi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, secara berkesinambungan.

## **Program Penunjang**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

#### **d. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

#### **c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana kerja tahun 2021 ini disusun sebagai kerangka acuan didalam perencanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis selama satu tahun. Dengan adanya program kerja tersebut diharapkan pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan secara terarah, terencana, terpadu dan sinergis dalam mencapai sasaran.

Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD tahun 2021. Keberhasilan pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari peran serta tanggung jawab seluruh pegawai Diskominfo Kabupaten Ciamis serta peran aktif stakeholder terkait.

Ciamis, 2021  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. DONDON RUDIANA, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196402181987031007

# **LAMPIRAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Organisasi / SKPD : 1.02.10.01. -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Halaman 1 dari 7

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1.02.10.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							385.000.000,00	35.000.000,00
<b>1.02.10.1.02.10.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>Terlayannya administrasi perkantoran melalui penyediaan makan dan minum rutin</b>			030.000.000,00	30.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Diskominfo Kab. C				400.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Diskominfo Kab. C				100.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0	Penyediaan alat tulis kantor			Diskominfo Kab. C				50.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Diskominfo Kab. C				25.000.000,00	5.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Diskominfo Kab. C				25.000.000,00	5.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Diskominfo Kab. C				15.000.000,00	5.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0	Penyediaan makanan dan minuman			Diskominfo Kab. C				120.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Kab. Ciamis				250.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0	Rapat-rapat koordinasi di dalam daerah			Kab. Ciamis				45.000.000,00	5.000.000,00

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1.02.10.1.02.10.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>			265.000.000,00	35.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Pembangunan gedung kantor			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Kab.Ciamis				750.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Diskominfo Kab. C				50.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor			Diskominfo Kab. C				200.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Pengadaan peralatan kantor			Diskominfo Kab. C				100.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Pengadaan perlengkapan kantor			Diskominfo Kab. C				25.000.000,00	5.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Diskominfo Kab. C				600.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Diskominfo Kab. C				200.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Diskominfo Kab. C				20.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			Diskominfo Kab. C				20.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0	Penyusunan Perencanaan/DED Gedung Kantor			Diskominfo Kab. C				300.000.000,00	10.000.000,00
<b>1.02.10.1.02.10.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>			30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0	Pendidikan dan pelatihan formal			Kab.Ciamis				30.000.000,00	10.000.000,00
<b>1.02.10.1.02.10.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>Meningkatnya sistem pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah</b>			40.000.000,00	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.06.0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Diskominfo Kab. C				10.000.000,00	0.000.000,00

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.02.10.1.02.10.01.06.0	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Diskominfo Kab. C				10.000.000,00	0.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.06.0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Diskominfo Kab. C				10.000.000,00	0.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.06.0	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD			Diskominfo Kab. C				10.000.000,00	0.000.000,00
<b>1.02.10.1.02.10.01.07.</b>	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>				<b>Meningkatnya sistem pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah</b>			20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.07.0	Penyusunan rencana strategis			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.07.0	Penyusunan rencana kerja			Diskominfo Kab. C				10.000.000,00	0.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.07.0	Penyusunan rencana kerja anggaran			Diskominfo Kab. C				10.000.000,00	0.000.000,00
<b>1.02.10.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							784.180.000,00	34.180.000,00
<b>1.02.10.1.02.10.01.15.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>				<b>Tersampainya informasi di Kabupaten Ciamis</b>			-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Pemeliharaan Alat Relay TV			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Pembinaan KIM			Kab. Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Operasionalisasi Website Kabupaten Ciamis			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Operasionalisasi LPSE			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Tradisional Pertunjukan Rakyat			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Interpersonal ( Ceramah, Diskusi )			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Peningkatan Sarana Prasarana LPSE			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Telematika			Kab.Ciamis				-	-

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Pengelolaan Informasi Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID )			Kab. Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Pengadaan Fasilitas Layanan Bergerak Diskominfo			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Pengembangan Desa / Kelurahan Cerdas Internet			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Pembangunan Ciamis Command Center			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Pengadaan Jaringan Untuk Area Publik			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.15.0	Operasional Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi ( PLID ) Kabupaten Ciamis			Kab.Ciamis				-	-
<b>1.02.10.1.02.10.01.18.</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b>				<b>Tersebarluaskannya Informasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Melalui Radio</b>			913.610.000,00	13.610.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.0	Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio			Kabupaten Ciamis				913.610.000,00	3.610.000,00
<b>1.02.10.1.02.10.01.20.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>				<b>Tersampainya Informasi di Kabupaten Ciamis</b>			570.570.000,00	70.570.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.0	Layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.20.0	Integrasi Layanan Publik dan pemerintahan			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.20.0	Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.20.0	Layanan akses internet, intranet dan Komunikasi intra Pemerintah Daerah			Kab.Ciamis				-	-

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.02.10.1.02.10.01.20.0	Layanan dasar infrastruktur Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK			Kab.Ciamis				-	-
1.02.10.1.02.10.01.20.0	Pembinaan dan pendataan kelompok informasi masyarakat (KIM)			Kabupaten Ciamis				129.150.000,00	9.150.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.0	Pengelolaan Informasi Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)			Kabupaten Ciamis				230.000.000,00	0.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.0	Penyebarluasan Informasi Melalui Media			Kabupaten Ciamis				211.420.000,00	1.420.000,00
<b>1.02.10.1.02.10.01.21.</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>				<b>Terselenggaranya Ekosistem TIK Pemerintah Daerah Penunjang Smart City dan e-government</b>			300.000.000,00	0.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.0	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City			Kab. Ciamis				300.000.000,00	0.000.000,00
<b>1.02.14.</b>	<b>STATISTIK</b>							439.000.000,00	39.000.000,00
<b>1.02.14.1.02.10.01.15.</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>				<b>Tersedianya Data dan Hasil Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis</b>			300.000.000,00	0.000.000,00
1.02.14.1.02.10.01.15.0	Pendataan Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis			Kab. Ciamis				300.000.000,00	0.000.000,00
1.02.14.1.02.10.01.15.0	Pendataan Analisis Nilai Tukar Petani			Kab.Ciamis				-	-
1.02.14.1.02.10.01.15.0	Pendataan Perkembangan Ekonomi Triwulan			Kab.Ciamis				-	-
1.02.14.1.02.10.01.15.0	Pendataan Perkembangan Ekonomi Per Kecamatan			Kab.Ciamis				-	-
1.02.14.1.02.10.01.15.0	Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Per Kecamatan			Kab.Ciamis				-	-

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.02.14.1.02.10.01.15.0	Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis			Kab.Ciamis				-	-
1.02.14.1.02.10.01.15.0	Parameter Pembangunan Manusia Per Kecamatan			Kab.Ciamis				-	-
1.02.14.1.02.10.01.15.0	Analisis Kemiskinan Kab.Ciamis			Kab.Ciamis				-	-
<b>1.02.14.1.02.10.01.16.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>				<b>Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Ciamis</b>			139.000.000,00	39.000.000,00
1.02.14.1.02.10.01.16.0	Pengumpulan Data Statistik Sektoral			Kab.Ciamis				-	-
1.02.14.1.02.10.01.16.0	Pengelolaan Data Statistik Sektoral			Kab. Ciamis				108.000.000,00	18.000.000,00
1.02.14.1.02.10.01.16.0	Membangun Metadata Statistik Sektoral			Kab.Ciamis				-	-
1.02.14.1.02.10.01.16.0	Diseminasi Data Statistik Sektoral			Kab. Ciamis				31.000.000,00	1.000.000,00
<b>1.02.15.</b>	<b>PERSANDIAN</b>							150.000.000,00	50.000.000,00
<b>1.02.15.1.02.10.01.23.</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>								
<b>1.02.15.1.02.10.01.24.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIPD)</b>				<b>Terwujudnya peningkatan keamanan informasi</b>			150.000.000,00	50.000.000,00
1.02.15.1.02.10.01.24.0	Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi			Kab.Ciamis				-	-
1.02.15.1.02.10.01.24.0	Literasi Kemanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik			Kab.Ciamis				-	-
1.02.15.1.02.10.01.24.0	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi			Kab. Ciamis				150.000.000,00	0.000.000,00
1.02.15.1.02.10.01.24.0	Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi			Kab.Ciamis				-	-
<b>TOTAL</b>								8.758.180.000	3.274.540.000

CIAMIS, 02 Mei 2020

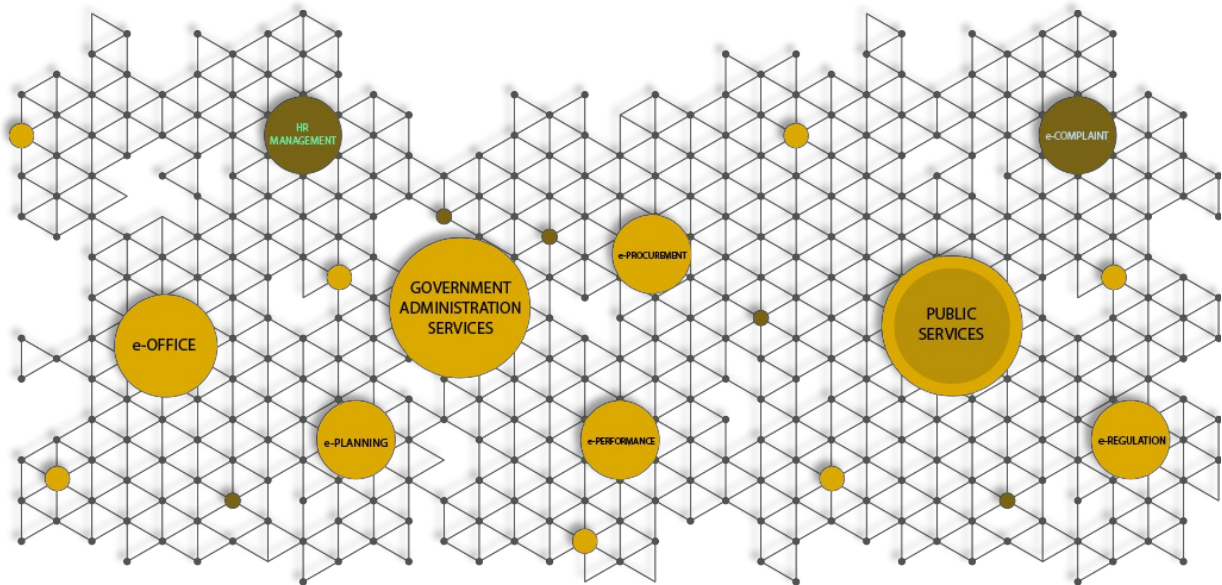
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drs. H. DICKY ERWIN JULIADY, M.Si

19600708 198603 1 012



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



# INDEKS SPBE

## PEMERINTAH KAB. CIAMIS

**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 20 Januari 2021

Deputi Bidang Kelembagaan  
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2020

## Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri PEMBERDAYAAN Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

## Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

### Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

<b>1. Rintisan</b>	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .
<b>2. Terkelola</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
<b>3. Terstandar-disasi</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.
<b>4. Terintegrasi dan Terukur</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
<b>5. Optimum</b>	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

### Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

<b>1. Informasi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
<b>2. Interaksi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
<b>3. Transaksi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
<b>4. Kolaborasi</b>	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
<b>5. Optimalisasi</b>	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

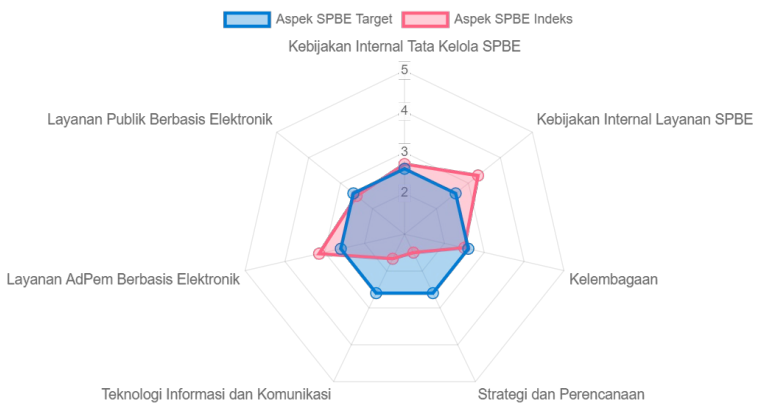
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>17%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>28%</b>
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
<b>Domain 3 - Layanan SPBE</b>	<b>55%</b>
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2.26	3.19	3.14	2.37	2.56	2.04	2.43
Domain Kebijakan	2.07	2.94	2.92	2.14	2.94	1.86	2.18
Kebijakan Tata Kelola	2.01	2.75	2.99	2.15	2.42	1.79	2.18
Kebijakan Layanan	2.11	3.07	2.87	2.13	2.50	1.91	2.18
Domain Tata Kelola	1.95	2.87	2.97	2.32	2.87	1.70	2.08
Kelembagaan	1.88	2.90	2.93	2.28	2.04	1.64	2.02
Strategi & Perencanaan	1.97	2.66	2.98	2.25	2.44	1.74	2.10
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.98	2.99	3.00	2.40	2.29	1.72	2.12
Domain Layanan SPBE	2.48	3.43	3.29	2.47	3.43	2.26	2.69
Administrasi Pemerintahan	2.62	3.52	3.40	2.62	2.82	2.42	2.80
Layanan Publik	2.23	3.28	3.09	2.20	2.58	1.98	2.49

**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**

	Nama Indeks	Nilai
		SPBE
	Domain Kebijakan Internal SPBE	3,06
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,71
	Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,30
	Domain Tata Kelola SPBE	1,86
	Kelembagaan	2,50
	Strategi dan Perencanaan	1,50
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67
	Domain Layanan SPBE	2,91
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,14
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,50

**Kekuatan dan Kelemahan**

**A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Tata Kelola yang telah dipenuhi oleh Pemkab Ciamis adalah dengan adanya Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi, Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK, Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi, Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai.

- **Kekuatan**  
Pada Aspek Kebijakan Tata Kelola ini dapat terlihat bahwa Kebijakan Internal Tim Pengarah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE Pemkab Ciamis.
- **Kelemahan**  
Namun disisi lain, Pemkab Ciamis masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE, Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan.

**B. Kebijakan Internal Layanan SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemkab Ciamis adalah dengan adanya Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas, Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian, Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan, serta Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- **Kekuatan**  
Pada Aspek Kebijakan Tata Kelola ini dapat terlihat bahwa Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja, Kebijakan Internal Layanan Pengadaan, Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik, Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE Pemkab Ciamis.
- **Kelemahan**  
Namun disisi lain, Pemkab Ciamis masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait

Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan.

#### C. Kelembagaan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kelembagaan yang telah dipenuhi oleh Pemkab Ciamis adalah dengan adanya Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi.

- Kekuatan  
Tidak ada kekuatan.
- Kelemahan  
Pemkab Ciamis telah memiliki Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah, namun tidak ditemukan adanya bukti dukung yang memadai berkaitan atas tugas/fungsi yang telah dilaksanakan.

#### D. Strategi dan Perencanaan

Tidak ada pemenuhan aspek.

- Kekuatan  
Tidak ada kekuatan.
- Kelemahan  
Pemkab Ciamis telah memiliki dokumen rencana induk SPBE namun belum memuat seluruh cakupan muatan yang dipersyaratkan. Pemkab Ciamis juga belum memiliki data dukung yang memadai atas adanya mekanisme konsultasi/koordinasi atas Anggaran dan Belanja TIK bersama Diskominfo.

#### E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tidak ada pemenuhan aspek.

- Kekuatan  
Tidak ada kekuatan.
- Kelemahan  
Pemkab Ciamis belum sepenuhnya mengoperasikan Pusat Data secara terpusat, serta belum memenuhi Integrasi Sistem Aplikasi dan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang memadai dalam data dukung yang disampaikan.

#### F. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Pemkab Ciamis adalah dengan adanya Layanan Naskah Dinas, Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Perencanaan, Layanan Manajemen Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, dan Layanan Manajemen Kinerja.

- Kekuatan  
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Layanan Pengadaan menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE Pemkab Ciamis.
- Kelemahan  
Tidak ada kelemahan.

#### G. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Pemkab Ciamis adalah dengan adanya Aplikasi Pembuatan Kartu Kuning dan Layanan Perijinan Online.

- Kekuatan  
Pada Aspek ini dapat terlihat bahwa Layanan Layanan Pengaduan Publik menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE Pemkab Ciamis.
- Kelemahan  
Namun disisi lain, Pemkab Ciamis masih belum memiliki Layanan Whistle-Blowing System, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang memadai dalam data dukung yang disampaikan. Sementara pada layanan lainnya (E-Library dan JDIH) masih berada pada tingkatan interaksi.



## Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE. Adapun hasil evaluasi SPBE yang dilakukan telah memberikan gambaran pelaksanaan aspek-aspek SPBE sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Pemkab Ciamis telah menerapkan SPBE dengan baik pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Kebijakan Internal Layanan SPBE, Kelembagaan, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Seluruh penerapan ini menjadikan layanan pemerintahan dapat terselenggara secara baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun disisi lain, masih terdapat kelemahan pada aspek Strategi dan Perencanaan, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kelemahan ini dapat berdampak pada penyelenggaraan SPBE yang tidak terarah dengan baik, terjadinya inefisiensi anggaran, hambatan terjadinya kolaborasi penyelenggaraan layanan lintas unit kerja, hingga potensi terjadinya gangguan pada penyelenggaraan SPBE. Pemkab Ciamis dapat memprioritaskan pembaharuan dokumen Rencana Induk SPBE, dimana dokumen ini dapat sekaligus memperbaiki aspek Strategi dan Perencanaan, serta aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi. Didalam dokumen Rencana Induk dapat memuat Rencana Integrasi Sistem Aplikasi, serta Rencana Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai. Berikutnya, Pemkab Ciamis dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPBE dengan menyempurnakan lebih lanjut pengaturan yang saat ini telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SPBE. Didalamnya dapat dielaborasi lebih lanjut pengaturan penyelenggaraan SPBE yang spesifik dalam lingkungan Pemkab Ciamis. Sebagai contoh: pengaturan yang telah ada dalam Surat Himbauan Bupati Ciamis Nomor 049/396/Diskominfo dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Bupati, sehingga memastikan amanat adanya koordinasi perencanaan anggaran dengan Diskominfo selalu terlaksana (sehingga data dukung akan selalu tersedia).

## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	4
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	3
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	2
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	3
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	1
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	3
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	3
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	3
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	3
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	4
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	3
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	4
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	4
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	4
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	4
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	2
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	3
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	2
21	Anggaran dan Belanja TIK	1
22	Pengoperasian Pusat Data	2
23	Integrasi Sistem Aplikasi	1
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	2
25	Layanan Naskah Dinas	3
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	3
27	Layanan Manajemen Perencanaan	3
28	Layanan Manajemen Penganggaran	3
29	Layanan Manajemen Keuangan	3
30	Layanan Manajemen Kinerja	3
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	4
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
34	Layanan Whistle-Blowing System	1
35	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1	3
36	Layanan Publik Instansi Pemerintah 2	2
37	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3	3